



## Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan

Khairani Matondang<sup>1</sup> Zackya Hayati Lubis<sup>2</sup> Muhammad Yudi Fajri<sup>3</sup> Saskia Bella<sup>4</sup> Bunga Madu Simanungkalit<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [zackyahayatilubis4@gmail.com](mailto:zackyahayatilubis4@gmail.com)<sup>1</sup> [yudimuhammad255@gmail.com](mailto:yudimuhammad255@gmail.com)<sup>3</sup>  
[bsaskia281@gmail.com](mailto:bsaskia281@gmail.com)<sup>4</sup> [bungasimanungkalit3@gmail.com](mailto:bungasimanungkalit3@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan keuangan menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola yang baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam menjamin operasi pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengeksplorasi peran SPIP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait implementasi SPIP dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP yang baik dapat meminimalisir risiko penyimpangan keuangan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi SPIP dapat menjadi strategi utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat penerapan SPIP melalui peningkatan kapabilitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi

### Abstract

*Transparency and accountability in financial governance are crucial issues in building good governance. The Government Internal Control System (SPIP) has an important role in ensuring that financial management operations run effectively, efficiently, and in accordance with applicable regulations. This study explores the role of SPIP in improving financial transparency and accountability in Medan City. The method used is a literature review by analyzing various sources related to SPIP implementation and its impact on the quality of local government financial reports. The results showed that good SPIP implementation can minimize the risk of financial irregularities, improve information disclosure, and strengthen internal control mechanisms. The conclusion of this study confirms that SPIP optimization can be a key strategy in increasing public trust in local financial management. Therefore, it is recommended that local governments continue to strengthen the implementation of SPIP through increasing the capabilities of the apparatus, continuous supervision, and utilization of information technology in the internal control system.*

**Keywords:** Accountability, Financial Management, Internal Control System, Transparency



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal, pemerintah daerah diharuskan untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dua prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan. Salah satu instrumen yang berperan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sistem pengendalian internal. Sistem ini berfungsi untuk menjaga integritas laporan keuangan, mengurangi risiko kecurangan, serta meningkatkan



efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki anggaran yang besar untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Beberapa temuan mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, rendahnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta kurang optimalnya mekanisme audit internal yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Fenomena ini semakin relevan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat dan berbagai lembaga pemantau keuangan publik semakin aktif dalam mengawasi penggunaan dana daerah, termasuk dalam kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pengendalian internal dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kota Medan akan dipelajari. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut. Dengan melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan membandingkan temuan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Agar penelitian tidak meluas, pembahasan dalam kajian ini dibatasi pada evaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kajian ini tidak akan membahas pengendalian internal di sektor swasta atau di instansi pemerintah lainnya selain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan membahas beberapa elemen penting dari sistem pengendalian internal yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kota Medan. Kajian ini mencakup evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, identifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Tinjauan Pustaka**

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa perusahaan mencapai tujuannya dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku (Arens, Elder, & Beasley, 2015). Sistem pengendalian internal sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan publik jelas dan akuntabel. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah pemerintah dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik. Ningsih, Kaukab, dan Azka (2023) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem informasi akuntansi, dan pemerintahan yang baik berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian internal memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dan pemerintahan bekerja sama dengan baik, yang berdampak pada laporan keuangan yang bagus. Selain itu, akuntabilitas keuangan sangat penting untuk menentukan kualitas laporan keuangan. Idawati dan Eleonora (2020) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah kota dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan, sehingga sistem pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan memiliki peran strategis dalam membangun pemerintahan yang baik.

Tidak banyak penelitian yang dilakukan tentang bagaimana sistem pengendalian internal dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan melihat bagaimana sistem dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, didukung oleh kompetensi SDM yang memadai dan penerapan prinsip good government governance, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, implementasi sistem pengendalian internal sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen manajemen, dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, auditor internal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melihat bagaimana peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan, penelitian ini menggunakan metode review literatur. Teori, gagasan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini dipelajari. Metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana sistem pengendalian internal, transparansi keuangan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berhubungan satu sama lain. Data dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Literatur Teoritis. Buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang membahas sistem kontrol internal, kejelasan, dan akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Medan untuk memahami implementasi pengendalian internal dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Dokumen audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memuat temuan terkait pengelolaan keuangan di Kota Medan.
4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah. Peraturan yang menentukan pengelolaan keuangan daerah termasuk Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan dengan sistem pengendalian internal dan transparansi keuangan di Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Pencarian Literatur Elektronik. Mengakses jurnal dari database seperti Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, dan jurnal-jurnal nasional yang terindeks SINTA.
2. Analisis Laporan Keuangan dan Audit. Mengkaji dokumen resmi dari situs pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pemerintah Kota Medan.
3. Telaah Regulasi dan Kebijakan. Menganalisis peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proses berikut digunakan untuk menganalisis data penelitian secara deskriptif-kualitatif:

1. Reduksi Data. Memilah dan merangkum informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian.

2. Klasifikasi dan Sintesis. Mengelompokkan informasi berdasarkan variabel penelitian, yaitu sistem pengendalian internal, transparansi keuangan, dan akuntabilitas keuangan.
3. Analisis Kritis. Membandingkan hasil penelitian terdahulu dan temuan dari sumber data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal di Kota Medan.
4. Interpretasi dan Kesimpulan. Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi akademik yang memberikan wawasan mengenai peran sistem pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dengan metode ini, diharapkan bahwa penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Transparansi Keuangan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah salah satu dari banyak kebijakan yang mengatur sistem pengendalian internal. Namun, efektivitas penerapan masih mengalami kendala.

**Tabel 1. Menunjukkan Hasil Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Terhadap Pemerintah Kota Medan Selama Tiga Tahun Terakhir**

Tahun	Kriteria Transparansi	Hasil Evaluasi
2021	Keterbukaan Laporan Keuangan	Cukup Baik
2022	Keterbukaan Laporan Keuangan	Baik
2023	Keterbukaan Laporan Keuangan	Baik
2021	Pengungkapan Informasi Publik	Kurang Baik
2022	Pengungkapan Informasi Publik	Cukup Baik
2023	Pengungkapan Informasi Publik	Baik

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021–2023. Diakses dari <https://www.bpk.go.id>.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa transparansi keuangan meningkat setiap tahunnya, Meskipun demikian, masih ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki, terutama dalam keterbukaan pengadaan barang dan jasa.

### Dampak Sistem Pengendalian Akuntabilitas Keuangan Internal

Meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah seharusnya dapat dicapai melalui implementasi sistem pengendalian internal yang berhasil. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ningsih, Kaukab, dan Azka (2023), menunjukkan bahwa menggunakan sistem pengendalian internal meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, menurut penelitian ini, dalam hal Kota Medan, beberapa kendala masih menghambat akuntabilitas, seperti: Kurangnya pengawasan internal yang optimal. Masih adanya temuan penyalahgunaan anggaran dalam LHP BPK. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Dari data yang dikumpulkan, terdapat penurunan jumlah temuan dari 15 kasus pada tahun 2021 menjadi 7 kasus pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan penguatan sistem pengawasan internal agar akuntabilitas lebih optimal.

### Kendala dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kendala utama dalam implementasi sistem pengendalian internal di Kota Medan adalah:

1. Kurangnya kompetensi SDM. Banyak pegawai yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal.
2. Resistensi terhadap perubahan. Implementasi teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah belum sepenuhnya diterapkan karena adanya penolakan dari beberapa pihak terkait.
3. Keterbatasan anggaran pengawasan. Alokasi anggaran untuk pengawasan internal masih belum memadai untuk mendukung audit berkala dan pelatihan SDM.

**Tabel 2. Menyajikan Tingkat Kesulitan Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Aspek-Aspek Yang Diidentifikasi**

Aspek	Tingkat Kesulitan (1=Rendah, 5= Tinggi)
Kompetensi SDM	4
Penggunaan Teknologi	3
Pengawasan Internal	4
Partisipasi Publik	2

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian dan kajian literatur terkait sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Medan, 2025.

### Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan temuan di atas, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal di Kota Medan adalah:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Optimalisasi teknologi informasi dalam sistem akuntansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi.
3. Peningkatan peran masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap laporan keuangan daerah.
4. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan koordinasi antara auditor internal dan eksternal.

Hasil studi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan. Meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek, masih ada kendala yang harus diselesaikan agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal. Dengan adanya perbaikan dalam kompetensi SDM, teknologi informasi, serta penguatan pengawasan internal, diharapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dapat lebih meningkat di masa mendatang.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kota Medan. Sumber daya manusia yang buruk, resistensi terhadap teknologi informasi, dan keterbatasan anggaran untuk pengawasan internal adalah beberapa hambatan yang menghambat sistem ini untuk berfungsi dengan baik. Temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK mengindikasikan adanya peningkatan dalam keterbukaan laporan keuangan dan pengungkapan informasi publik, tetapi masih terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian anggaran yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi aparatur dengan pelatihan yang



berkelanjutan serta menerapkan sistem akuntansi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, peningkatan pengawasan internal dengan koordinasi yang lebih baik antara auditor internal dan eksternal sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel. Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat melalui mekanisme keterbukaan informasi yang lebih mudah diakses agar pengawasan publik terhadap anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pengendalian internal di Kota Medan dapat lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- Awalia, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKD Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 51–56. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2045>
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Study and Accounting Research*, XI(1), 1–14.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 165–171.
- Manoppo, R. M. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1007–1015. [https://doi.org/10.1016/s1872-2067\(09\)60076-0](https://doi.org/10.1016/s1872-2067(09)60076-0)
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228>
- Pakpahan, Y. E. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM. *AKUNTABEL*, 17(2), 10. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.7436>
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020a). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 4(1), 110–123.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern



Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.

- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Nasional*, 17(4), 1–13. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>